

SKRIPSI

PERBANDINGAN PEMBatasan KEBERPIHAKAN PRESIDEN PADA MOMENTUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS

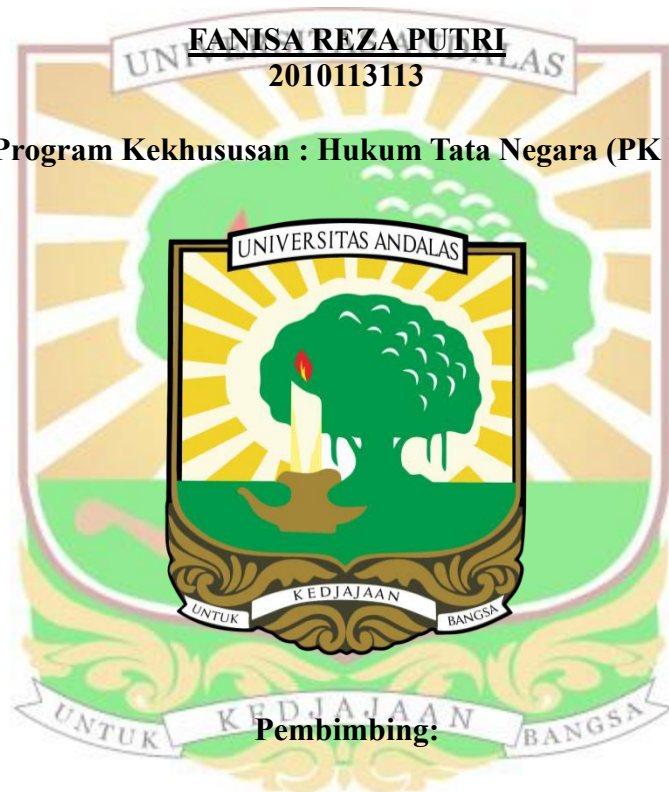
*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

FANISA REZA PUTRI

2010113113

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK V)



Pembimbing:

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H

Ilhamdi Putra, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg: 29/PK-V/IV/2025

**PERBANDINGAN PEMBATASAN KEBERPIHAKAN PRESIDEN PADA
MOMENTUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS**

*(Fanisa Reza Putri, 2010113113, Program Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V),
Pembimbing Khairul Fahmi, Ilhamdi Putra, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 84
Halaman, 2025)*

ABSTRAK

Fenomena keberpihakan Presiden dalam pemilu Indonesia seperti yang ditunjukkan pernyataan Presiden Jokowi dinilai mengancam integritas demokrasi dan memicu kontroversi terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan, di mana secara hukum hal itu tidak diperbolehkan berdasarkan UU Pemilu. Di Amerika Serikat, walaupun tidak ada pengaturan mengenai keberpihakan Presiden dan dukungan internal antar partai merupakan hal lumrah namun ada batasan secara etik, ini mencerminkan perbedaan sistem politik dan budaya politik di kedua negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini *Pertama*, bagaimana pengaturan keberpihakan Presiden pada momentum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat? *Kedua*, bagaimana efektivitas pengaturan pembatasan keberpihakan Presiden pada momentum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam upaya mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan perbandingan. Data dianalisa secara kualitatif untuk memahami regulasi dan perspektif pakar terkait objektivitas dan netralitas Presiden dalam pemilu. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tidak ada larangan keberpihakan Presiden selama periode pemilu di Amerika Serikat namun norma politik dan budaya politik cenderung membatasi keberpihakannya. Sedangkan di Indonesia walaupun adanya larangan untuk berpihak atau mendukung namun pengaturannya tidak jelas sehingga pentingnya regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan budaya politik yang menjunjung tinggi netralitas untuk memastikan pemilu yang jujur dan berintegritas. Untuk itu dibutuhkan konstruksi penataan regulasi terkait keberpihakan Presiden, peningkatan peran lembaga pengawas, serta penguatan etika dan budaya politik.

Kata kunci: Keberpihakan, Pemilu, Netralitas, Budaya Politik.

THE COMPARISON OF RESTRICTIONS ON PRESIDENTIAL PARTISANSHIP DURING THE PRESIDENTIAL AND VICE PRESIDENTIAL ELECTIONS BETWEEN INDONESIA AND THE UNITED STATES IN CREATING GENERAL ELECTIONS WITH INTEGRITY

*Fanisa Reza Putri, 2010113113, Concentration Program Constitutional Law (CP V),
Supervisors: Khairul Fahmi, Ilhamdi Putra, Faculty of Law, Andalas University, 84 pages,
2025*



The phenomenon of presidential partisanship in the Indonesian elections, as demonstrated by President Jokowi's statement, is considered to threaten the integrity of democracy and spark controversy regarding the potential for abuse of power, which is legally prohibited under the Election Law. In the United States, although there are no regulations regarding presidential partisanship and internal support between parties is commonplace, there are ethical limits, reflecting the differences in political systems and political cultures in the two countries. The problem formulation in this study is: *First*, how are the regulations on presidential partisanship during the momentum of the presidential and vice-presidential elections in Indonesia and the United States? *Second*, how effective are the regulations on limiting presidential partisanship during the momentum of the presidential and vice-presidential elections in Indonesia in efforts to realize elections with integrity? The type of research used is normative juridical. The research approach uses a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Data are analyzed qualitatively to understand regulations and expert perspectives regarding the objectivity and neutrality of the president in the election. The results of this study explain that there is no prohibition on presidential partisanship during the election period in the United States, but political norms and political culture tend to limit his partisanship. Meanwhile, in Indonesia, although there is a prohibition on taking sides or supporting any candidate, the regulations are unclear, thus highlighting the importance of clear regulations, effective oversight, and a political culture that upholds neutrality to ensure fair and honest elections with integrity. This requires the construction of regulatory arrangements regarding presidential partisanship, an increased role for oversight bodies, and strengthening of political ethics and culture.

Keywords: *Partisanship, Election, Neutrality, Political Culture*